

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN KELUARGA**

***COMMUNITY EMPOWERMENT THROUGH VILLAGE-OWNED
ENTERPRISES (BUMDES) IN IMPROVING FAMILY INCOME***

Nurul Azmi Herdianti^{1*}, Yus Darusman², Ahmad Hamdan³

^{1,2,3}Universitas Siliwangi, Jawa Barat

*Alamat Email Penulis Korespondensi: 222103045@student.unsil.ac.id

Diserahkan: 06/12/2025 Diperbaiki: 09/02/2026 Disetujui: 25/03/2026

DOI : 10.47441/jkp.v21i1.470

Abstrak

BUMDes Wargakerta merupakan salah satu BUMDes yang mampu menjalankan program usaha dan pemberdayaan masyarakat secara aktif, berbeda dengan sebagian BUMDes lain di Kecamatan Sukarame yang masih pasif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat melalui program BUMDes Wargakerta dalam meningkatkan pendapatan keluarga di Desa Wargakerta, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis fenomenologi. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberdayaan dilaksanakan melalui tujuh tahapan, yaitu persiapan, pengkajian, perencanaan, formalisasi rencana aksi, implementasi, evaluasi, dan terminasi, yang seluruhnya melibatkan pemerintah desa, pengurus BUMDes, dan masyarakat mitra. BUMDes Wargakerta mengelola enam unit usaha, yaitu ayam petelur, ikan lele, lumbung padi, Wi-Fi, BRILink dan PPOB, serta pengelolaan GOR. Sebagian usaha dijalankan melalui kemitraan, sedangkan sebagian lainnya dikelola langsung oleh pengurus. Program ini terbukti meningkatkan pendapatan keluarga mitra dengan rata-rata tambahan sebesar Rp515.000 per bulan. Unit ayam petelur dan Wi-Fi memberikan tambahan pendapatan terbesar, sedangkan unit ikan lele, lumbung padi, PPOB, dan GOR juga memberikan pemasukan yang stabil. Sebagian keuntungan usaha juga dialokasikan untuk santunan melahirkan, kematian, dan bantuan bagi masyarakat yang sedang sakit. Dengan demikian, pemberdayaan melalui BUMDes Wargakerta mampu meningkatkan pendapatan keluarga.

Kata Kunci: BUMDes, Pemberdayaan Masyarakat, Pendapatan Keluarga

Abstract

BUMDes Wargakerta is a village-owned enterprise that actively implements business and community empowerment programs, distinguishing itself from several dormant BUMDes within the Sukarame Subdistrict. This study aims to examine the role of BUMDes Wargakerta's programs in empowering the community and improving family income in Wargakerta Village, Sukarame Subdistrict, Tasikmalaya Regency. Utilizing a qualitative approach with a phenomenological design, data were collected through interviews, field observations, and documentation. The results indicate that the empowerment process was executed through seven distinct stages: preparation, assessment, planning, formalization, implementation, evaluation, and termination. This process involved active collaboration between the village government, BUMDes management, and partner communities. Currently, BUMDes Wargakerta manages six business units: layer chicken farming, catfish cultivation, rice barns, Wi-Fi services, BRILink and PPOB services, and village sports hall management. While some units operate through partnership schemes, others are managed directly by BUMDes administrators. The findings reveal that these programs have increased the monthly income of partner families by an average of Rp515,000, with the layer chicken and

Wi-Fi units contributing the most significant gains. Additionally, the catfish, rice barn, PPOB, and sports hall units provided stable supplementary earnings. Beyond economic benefits, a portion of the business profits is allocated toward social assistance, providing childbirth support, medical aid, and funeral assistance for the community. In conclusion, community empowerment through BUMDes Wargakerta effectively improves family income and strengthens local social safety nets.

Keywords: *BUMDes, Community Empowerment, Family Income*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam melimpah. Pembangunan ekonomi, terutama di wilayah pedesaan, menjadi salah satu pilar penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Desa, sebagai unit pemerintahan terkecil, memiliki peran strategis dalam menciptakan keseimbangan pembangunan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BUMDes merupakan badan usaha yang dibentuk oleh pemerintah desa untuk mengelola potensi ekonomi desa dan memanfaatkan sumber daya lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Junaidi *et al*, 2021).

Pembangunan desa juga tidak hanya dipahami sebagai upaya peningkatan ekonomi, tetapi sebagai proses yang kompleks dan berkelanjutan. Menurut Mardikanto dalam Patilaiya (2011) pembangunan merupakan upaya yang dilakukan secara sadar, terencana, dan berkesinambungan oleh pemerintah bersama masyarakat untuk memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi demi tercapainya kualitas hidup yang sejahtera. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pembangunan tersebut, diperlukan adanya strategi perencanaan yang tepat dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat agar potensi yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal. Robert Chamber dalam Patilaiya (2011) mengemukakan bahwa pemberdayaan merupakan konsep pembangunan ekonomi yang mencakup nilai-nilai sosial, partisipasi masyarakat, keadilan, dan keberlanjutan.

Salah satu dampak nyata dari pemberdayaan masyarakat adalah peningkatan pendapatan keluarga. Dengan pemberdayaan masyarakat, anggota keluarga memperoleh keterampilan baru, akses terhadap modal, dan peluang usaha yang lebih baik. Hal tersebut dapat membantu masyarakat memperoleh pendapatan yang lebih besar dan berkelanjutan. Dalam upaya mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa, pemerintah telah meluncurkan berbagai program dan inisiatif yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan, salah satunya melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pemberdayaan melalui BUMDes adalah proses pemberdayaan potensi pembangunan yang ada di desa yang bersumber dari, oleh, dan untuk masyarakat atau dengan kata lain dilaksanakan secara partisipatif (Shifa and Ilyas 2021).

Penerapan konsep pemberdayaan tersebut dapat dilihat secara nyata di Desa Wargakerta, Kecamatan Sukarame. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, BUMDes ini dibentuk sebagai sebuah entitas usaha yang kepemilikan atau pengelolaannya dilakukan secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa. BUMDes Wargakerta mengembangkan berbagai jenis unit usaha yang aktif dan produktif, yaitu: budidaya ayam petelur, budidaya ikan lele, unit usaha internet Wi-Fi, unit usaha BRILink dan *Payment Point Online Bank* (PPOB), unit usaha Gelanggang Olah Raga (GOR) Desa, dan unit usaha lumbung padi. Melalui kegiatan kemitraan ini, masyarakat mitra memperoleh tambahan pendapatan dari hasil usaha bersama yang dikelola secara profesional, yakni pendapatan keluarga mitra usaha meningkat dibanding sebelum bergabung dengan program BUMDes Wargakerta.

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan BUMDes Wargakerta ini menunjukkan bahwa potensi lokal yang dikelola secara partisipatif dan profesional dapat menjadi model pemberdayaan ekonomi desa yang berkelanjutan. Meninjau uraian tersebut, maka penting untuk dikaji bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui program

BUMDes dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi pengembangan program BUMDes di desa-desa lain.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi untuk memahami pengalaman dan makna pemberdayaan masyarakat melalui program BUMDes Wargakerta dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Subjek penelitian ditentukan dengan teknik *purposive sampling*, berjumlah delapan informan yang terdiri atas Kepala Desa Wargakerta, Direktur dan Sekretaris BUMDes, serta lima masyarakat mitra yang mewakili unit usaha BUMDes Wargakerta.

Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan triangulasi sumber dan teknik untuk menjaga keabsahan data. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Wargakerta, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Hasil Temuan Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa BUMDes Wargakerta (Kerta Setra Utama) merupakan lembaga ekonomi desa yang dikelola bersama pemerintah desa dan masyarakat, serta dibentuk tahun 2018 berdasarkan kajian potensi desa di bidang peternakan, perikanan, dan pertanian. BUMDes Wargakerta mengembangkan enam unit usaha aktif: budidaya ayam petelur, ikan lele, lumbung padi, GOR, BRILink dan PPOB, serta layanan internet Wi-Fi dengan sistem kemitraan, yakni BUMDes menyediakan modal dan pendampingan, sementara masyarakat menjadi pelaksana usaha. BUMDes Wargakerta juga memiliki struktur organisasi yang jelas serta menjalankan tujuan ekonomi dan sosial, sehingga berkontribusi pada peningkatan pendapatan keluarga mitra.

Tahapan Pemberdayaan Masyarakat Melalui BUMDes Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga

a) Tahap Persiapan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap persiapan pemberdayaan melalui BUMDes Wargakerta dimulai dari gagasan NM selaku Kepala Desa yang, berdasarkan pengalamannya melihat keterbatasan fiskal desa, menilai bahwa desa membutuhkan sumber pendapatan mandiri sehingga BUMDes ditetapkan sebagai pengelola ekonomi desa. Melalui musyawarah desa, kelembagaan dibentuk dan AA ditetapkan sebagai Direktur BUMDes melalui SK, disertai pembentukan pengurus inti, penyusunan dokumen legalitas (Perdes, AD/ART, MoU), serta penyediaan sekretariat sebagai pusat administrasi dan koordinasi. AA menjelaskan bahwa rekrutmen pengurus dan mitra dilakukan bertahap sesuai kebutuhan unit usaha, sementara DF menuturkan bahwa fasilitas sekretariat dan dukungan modal awal dari pemerintah desa memperkuat operasional BUMDes. Temuan observasi atas tersimpannya dokumen struktur organisasi, daftar mitra, dan arsip laporan, serta kesaksian mitra seperti I dan DA yang merasakan kemudahan koordinasi, memperkuat bahwa tahap persiapan berlangsung terstruktur dan partisipatif.

Kondisi tersebut selaras dengan Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan dalam Patilaiya (2011) yang menjelaskan bahwa tahap persiapan harus mencakup penguatan kelembagaan, penyiapan SDM, dan penataan administrasi sebelum kegiatan pemberdayaan dilaksanakan, serta selaras dengan Primafira *et al* (2024) yang menegaskan bahwa tahap persiapan diawali dengan pembentukan tim pelaksana, penyiapan administrasi, inventarisasi data calon mitra, dan koordinasi awal melalui rapat atau diskusi untuk menyusun langkah kerja. Dengan demikian, hasil penelitian dan kajian teori pada

uraian di atas sama-sama menguatkan bahwa tahap persiapan di BUMDes Kerta Setra Desa Wargakerta telah membangun dasar yang kuat bagi keberhasilan proses pemberdayaan pada tahap-tahap berikutnya.

b) Tahap Pengkajian

Berdasarkan pada hasil penelitian, tahap pengkajian di BUMDes Wargakerta dilakukan secara partisipatif dan terarah. AA menjelaskan bahwa pemetaan potensi desa dilakukan bersama LPM Universitas Padjadjaran, kemudian, seperti diungkapkan NM, hasilnya dibahas melalui musyawarah berjenjang dari dusun, RW, hingga desa. Dalam forum tersebut, masyarakat menyampaikan pengalaman dan kebutuhannya: potensi pertanian, peternakan, dan perikanan, sementara sebagian warga sebagaimana dijelaskan I dan dikuatkan DF menunjukkan kebutuhan terhadap layanan Wi-Fi, BRILink, dan PPOB. AM menegaskan bahwa keterlibatan warga dalam pengkajian membuat unit usaha yang direncanakan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Dokumentasi profil desa, notulen musyawarah, dan rencana usaha yang tersimpan di sekretariat, serta kesesuaian dengan enam unit usaha yang kini berjalan, menguatkan proses ini.

Pola tersebut selaras dengan model pemberdayaan yang dikemukakan (Patilaiya, 2011) yang menempatkan tahap pengkajian sebagai proses menggali potensi, kebutuhan, dan masalah masyarakat secara partisipatif sebelum program ditetapkan, serta selaras dengan Fathulloh *et al* (2024) yang menegaskan bahwa pengkajian harus mengidentifikasi potensi sumber daya manusia dan alam sekaligus persoalan yang dihadapi masyarakat. Dengan kata lain, keterlibatan berbagai pihak, pemetaan potensi yang terarah, dan orientasi pada peningkatan pendapatan keluarga menunjukkan bahwa tahap pengkajian di BUMDes Wargakerta tidak berhenti pada pendataan, tetapi berfungsi sebagai landasan strategis untuk merancang program pemberdayaan yang relevan, realistis, dan berakar pada konteks hidup masyarakat desa.

c) Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan, BUMDes Wargakerta mulai menyusun rencana unit usaha berdasarkan hasil pengkajian potensi desa yang sebelumnya telah dilakukan bersama pemerintah desa, pengurus, dan calon mitra. AA menjelaskan bahwa hasil pemetaan tersebut menjadi dasar penyusunan 18 rencana unit usaha, sementara DF menegaskan bahwa setiap rencana dipilih dengan mempertimbangkan kelayakan, kapasitas, dan keberlanjutan usaha mitra. NM menambahkan bahwa seluruh rencana selalu dimusyawarahkan dengan pemerintah desa agar selaras dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Dalam praktiknya, seperti dijelaskan DF, BUMDes memastikan program yang dirancang tidak mematikan usaha warga yang sudah ada, misalnya pada unit Wi-Fi Wargakerta, di mana pemilik konter lokal direkrut sebagai mitra, dan hal ini diperkuat oleh pengalaman I yang diundang dalam musyawarah untuk menyampaikan minat dan kesiapan usaha. Melalui serangkaian musyawarah tersebut, disepakati 6 unit usaha prioritas yang direalisasikan terlebih dahulu dari 18 rencana, sebagaimana ditegaskan DA dan A bahwa penetapan prioritas merupakan keputusan bersama dan calon mitra diberi ruang menyampaikan potensi kendala teknis. Dokumen rencana kerja, daftar hadir musyawarah, daftar mitra, dan berita acara prioritas yang tersimpan rapi di sekretariat menguatkan proses perencanaan ini.

Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan, yang dikutip oleh Patilaiya (2011) yang mengemukakan bahwa tahap perencanaan harus disusun berdasarkan hasil pengkajian masalah dan potensi, kemudian dirumuskan melalui diskusi bersama agar program yang dipilih relevan, realistis, dan dapat dijalankan secara bertahap. Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan di BUMDes Wargakerta telah mengikuti prinsip perencanaan pemberdayaan masyarakat. Tahap perencanaan di BUMDes Wargakerta tidak hanya menyusun daftar usaha, tetapi membangun arah pengembangan ekonomi desa yang realistis, bertahap, dan berbasis

kemitraan, sehingga tiap unit usaha benar-benar selaras dengan potensi lokal dan peningkatan pendapatan keluarga.

d) Tahap Formalisasi Rencana Aksi

Berdasarkan hasil penelitian, penetapan enam unit usaha prioritas BUMDes Wargakerta dilakukan melalui musyawarah desa, sebagaimana dijelaskan NM yang menegaskan bahwa seluruh keputusan BUMDes Wargakerta selalu lahir dari kesepakatan bersama, bukan keputusan sepihak. Kesepakatan tersebut kemudian disahkan dalam bentuk SK Kepala Desa, Perdes, AD/ART, serta dokumen legalitas lain, yang menurut AA menjadi dasar hukum utama dalam menjalankan kegiatan operasional. DF menambahkan bahwa seluruh dokumen tersebut disimpan di sekretariat dan digunakan sebagai pedoman administrasi dan pelaksanaan program, sementara hasil observasi menunjukkan bahwa arsip legalitas, struktur pengurus, dan daftar unit usaha tersusun lengkap dan mudah diakses. DA juga menjelaskan bahwa masyarakat juga terlibat dalam musyawarah penetapan, terutama untuk menyampaikan kesiapan teknis sebelum suatu unit usaha diformalkan.

Temuan ini selaras dengan yang dikemukakan oleh Dian, T.R & Maruf (2019) bahwa pada tahap formalisasi agen perubahan berperan membantu masyarakat merumuskan dan menetapkan program yang paling efektif untuk menjawab kebutuhan yang telah diidentifikasi. Penguatan lain juga dijelaskan oleh Fathulloh *et al* (2024), yang menyatakan bahwa tahap formalisasi merupakan fase perancangan kegiatan yang dilakukan oleh subjek pemberdayaan dengan pendampingan fasilitator. Hasil analisis menunjukkan bahwa tahap formalisasi di BUMDes Wargakerta telah memperjelas arah program dan memastikan proses pemberdayaan berjalan terencana serta berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa tahap formalisasi di BUMDes Wargakerta berhasil memberi kepastian hukum, kejelasan peran, dan komitmen bersama, sehingga program pemberdayaan lebih mudah dijalankan secara konsisten, diawasi, serta dipertahankan keberlanjutannya dalam jangka panjang bagi kesejahteraan ekonomi keluarga desa.

e) Tahap Implementasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap implementasi pada program BUMDes Wargakerta dijalankan melalui pembagian peran antara pengurus dan mitra, sebagaimana dijelaskan NM selaku Kepala Desa Wargakerta yang menyatakan bahwa pemerintah desa turut melakukan pendampingan dan pemantauan agar kegiatan tetap sesuai rencana. AA menegaskan bahwa seluruh unit usaha dilaksanakan melalui koordinasi rutin, baik pertemuan langsung maupun komunikasi melalui grup WhatsApp, sementara DF menjelaskan bahwa koordinasi diperlukan agar kendala lapangan cepat terdeteksi dan terselesaikan. Para mitra seperti I, DA, dan A juga menyampaikan bahwa dukungan fasilitas, modal, dan pendampingan dari BUMDes membuat kegiatan usaha lebih terarah serta menghasilkan pemasukan yang lebih stabil bagi keluarga. Hasil observasi memperlihatkan adanya pelaporan, pencatatan, dan arsip operasional yang rapi, sehingga implementasi benar-benar berlangsung aktif dan terpantau.

Temuan tersebut selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Dimas Alif.B.N., M. Saleh.S (2013) yang menjelaskan bahwa tahap implementasi merupakan proses pelaksanaan langsung untuk mewujudkan tujuan yang telah dirumuskan pada tahap sebelumnya. Selain itu, tahap ini juga konsisten dengan pandangan Dian & Ma'ruf (2019) yang menyatakan bahwa pelaksanaan program harus merujuk pada kesepakatan yang telah ditetapkan saat sosialisasi, sehingga menjadi fondasi penting keberhasilan pemberdayaan dan peningkatan pendapatan keluarga. Hasil analisis mengindikasikan bahwa implementasi program di BUMDes Wargakerta berjalan efektif karena mampu menghubungkan perencanaan, pelaksanaan usaha, dan perolehan pendapatan yang lebih stabil bagi keluarga mitra.

f) Tahap Evaluasi

Pada tahap evaluasi, BUMDes Wargakerta bersama pemerintah desa dan mitra secara rutin menilai jalannya setiap unit usaha melalui laporan bulanan maupun tiga bulanan, monitoring, dan peninjauan lapangan. NM selaku Kepala Desa menjelaskan bahwa evaluasi tidak hanya dilakukan internal, tetapi juga diawasi oleh kecamatan, kabupaten, serta dua kali oleh BPKP dan Inspektorat. AA sebagai Direktur BUMDes menegaskan bahwa evaluasi berfokus pada keaktifan mitra, keberlanjutan usaha, dan peningkatan pendapatan keluarga, sementara DF menyebutkan bahwa evaluasi dapat dilakukan sewaktu-waktu jika muncul kendala. Mitra juga menjelaskan pola evaluasi yang berbeda sesuai karakter usaha: Wi-Fi dan PPOB dievaluasi bulanan berdasarkan penjualan dan transaksi, Lumbung Padi dan GOR dievaluasi bersamaan dengan penyeteroran hasil, sedangkan ayam petelur menggunakan pencatatan harian berbasis aplikasi dan ikan lele dievaluasi tiap tiga bulan mengikuti siklus panen. Temuan tersebut diperkuat oleh dokumentasi jadwal evaluasi, arsip laporan, dan bukti penyeteroran hasil di sekretariat BUMDes.

Temuan tersebut selaras dengan pendapat Djazuli (2024) yang menyatakan bahwa evaluasi program pemberdayaan bertujuan menilai pencapaian tujuan, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat keberhasilan, serta menyusun rekomendasi perbaikan untuk keberlanjutan program. Tahap evaluasi di BUMDes Wargakerta tidak hanya menjadi mekanisme kontrol administratif, tetapi juga berfungsi sebagai sarana refleksi bersama untuk menjaga kualitas pelaksanaan usaha, memastikan keterlibatan mitra tetap terjaga, dan mengarahkan program pemberdayaan agar terus berdampak pada peningkatan pendapatan keluarga.

g) Tahap Terminasi

Para mitra BUMDes Wargakerta telah mampu menjalankan usaha secara mandiri dan menjaga kestabilan pendapatan keluarga. Peran pengurus dan pemerintah desa berada pada pendampingan ringan melalui komunikasi rutin, pemantauan, serta perbaikan tahunan, termasuk penyaluran sebagian keuntungan untuk kegiatan sosial masyarakat. Temuan ini selaras dengan hasil analisis yang memperlihatkan bahwa terminasi berlangsung ketika pola ketergantungan antara pengurus dan mitra mulai berkurang karena mitra telah memiliki kemampuan mengelola usaha secara stabil.

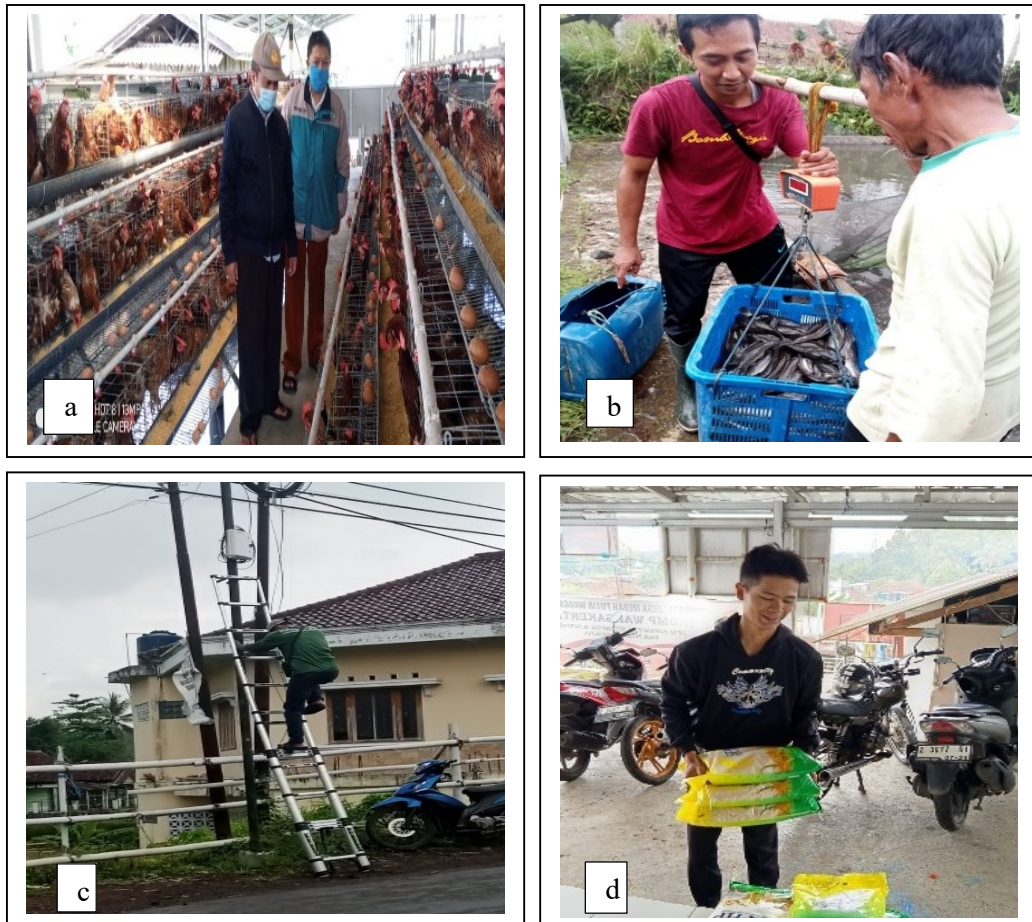
Hal ini sesuai dengan pandangan Fathulloh *et al* (2024), bahwa tahap terminasi merupakan fase ketika masyarakat telah mampu menjalankan program tanpa bergantung pada fasilitator, namun tetap mendapatkan dukungan komunikasi dan pengawasan ringan demi keberlanjutan program. Hasil analisis memperlihatkan bahwa kemandirian mitra, pendampingan yang proporsional, serta kontribusi sosial melalui dana BUMDes menunjukkan bahwa pemberdayaan telah mencapai tujuan akhirnya. Oleh karena itu, tahap terminasi di BUMDes Wargakerta menunjukkan keberhasilan pemberdayaan melalui kemandirian mitra, pendampingan ringan, dan manfaat sosial yang berkelanjutan. Program BUMDes Wargakerta ini telah berjalan stabil, diterima masyarakat, dan memberikan dampak ekonomi serta sosial yang nyata bagi keluarga mitra.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Wargakerta

a) Jenis Usaha yang Dijalankan BUMDes Wargakerta

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, BUMDes Wargakerta saat ini mengelola enam unit usaha, yaitu budidaya ayam petelur, budidaya ikan lele, lumbung padi, layanan Wi-Fi, BRILink dan PPOB, serta pengelolaan GOR. NM selaku Kepala Desa dan AA selaku Direktur BUMDes menjelaskan bahwa ayam petelur merupakan unit pertama dan paling produktif, dengan satu pengelola (DA) yang menangani pemeliharaan, pencatatan panen, dan distribusi telur ke warung mitra, sehingga menjadi penopang utama kas BUMDes dan sumber utama peningkatan pendapatan DA. Unit ikan lele dikembangkan

secara terintegrasi dengan ayam petelur melalui pemanfaatan limbah kotoran ayam sebagai pakan tambahan, sehingga biaya operasional turun dan seluruh hasil panen masuk ke kas BUMDes. Pada layanan Wi-Fi, AA dan DF menuturkan adanya 17 agen di setiap RW yang memasarkan *voucher* dengan perangkat dan jaringan yang sepenuhnya difasilitasi BUMDes; salah satu mitra menjelaskan bahwa pola ini mengubah pendapatan yang semula di bawah Rp1.000.000 menjadi sekitar Rp1.500.000 per bulan. Temuan serupa terlihat pada mitra Lumbung Padi dan PPOB yang mengaku terbantu karena stok beras dan saldo transaksi disediakan BUMDes, sementara pengelola GOR memperoleh honor tetap dari pengelolaan sewa ruangan dan lapangan badminton yang sebelumnya tidak dimiliki dari pekerjaan serabutan.



Gambar 1. a) Kandang Ayam Petelur BUMDes Wargakerta; b) Proses Panen Budidaya Ikan Lele; c) Proses Pemasangan Wi-Fi BUMDes Wargakerta; d) Proses Distribusi Beras kepada Mitra Lumbung Padi
Sumber: Dokumentasi Penelitian

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa pola pengelolaan enam unit usaha ini mencerminkan fungsi BUMDes dalam PPP 2007, sebagaimana dijelaskan oleh Dimiyati & Hanum (2022), yaitu fungsi pelayanan, ekonomi (keuntungan), dan keberlanjutan. Usaha ayam petelur dan Wi-Fi menjadi penopang utama karena perputaran yang cepat dan permintaan yang tinggi, sementara unit lain memperkuat akses pangan, layanan keuangan, dan fasilitas sosial masyarakat. Struktur unit usaha BUMDes Wargakerta tidak hanya sesuai dengan potensi lokal, tetapi juga mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, sehingga fungsi ekonomi, sosial, dan pelayanan dapat berjalan bersamaan. Secara fenomenologis,

pengalaman para mitra menunjukkan bahwa keterlibatan mereka dalam usaha tidak hanya menambah pendapatan, tetapi juga memberikan kepastian, rasa aman, serta ruang belajar yang sebelumnya tidak dimiliki, sehingga usaha yang dijalankan tidak sekadar menggerakkan ekonomi desa, tetapi juga membangun kepercayaan dan kapasitas warga. Enam unit usaha BUMDes Wargakerta terbukti berjalan efektif, memberi manfaat ekonomi dan sosial, serta memperkuat peran BUMDes sebagai lembaga pemberdayaan. Pola kemitraan, efisiensi usaha, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat menjadikan program berkelanjutan dan berdampak nyata bagi pendapatan keluarga.

b) Pelayanan, Keuntungan, dan Keberlanjutan Usaha BUMDes Wargakerta

Pelayanan BUMDes Wargakerta kepada mitra tampak dari pendampingan teknis yang berkelanjutan, pemantauan rutin, dan komunikasi yang terbuka di sekretariat. AA selaku Direktur dan DF selaku Sekretaris aktif melakukan koordinasi dan menerima konsultasi mitra, yang juga terlihat dari aktivitas tatap muka di sekretariat. Mitra Wi-Fi menuturkan bahwa akses konsultasi dan bantuan saat ada kendala teknis membuat penjualan voucher lebih stabil, sedangkan pengelola GOR merasakan bahwa penugasan dan pendampingan BUMDes membuka kesempatan kerja baru dengan pendapatan yang lebih pasti. BUMDes Wargakerta tidak hanya menghimpun laba ke kas lembaga, tetapi juga membaginya kepada mitra dan mengalokasikan sebagian untuk santunan kelahiran, sakit, dan kematian, sebagaimana tercatat dalam dokumentasi penyaluran dana sosial.

Pola ini selaras dengan yang dikemukakan oleh Khairina *et al* (2025) bahwa pelayanan aktif dan kemitraan mampu memperkuat ekonomi lokal. Endang (2021) juga menjelaskan bahwa BUMDes harus tumbuh dari kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar usahanya berkelanjutan. Pelayanan, keuntungan, dan keberlanjutan usaha di BUMDes Wargakerta telah berjalan selaras dengan prinsip pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan begitu, pelayanan yang dekat dengan mitra, pembagian keuntungan yang adil, dan adanya dana sosial menunjukkan bahwa BUMDes Wargakerta tidak hanya menguatkan ekonomi keluarga mitra, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan dan keberlanjutan di tingkat desa.

c) Akuntabilitas dan Perkembangan Aset Desa BUMDes Wargakerta

Akuntabilitas BUMDes Wargakerta tercermin dari cara pengelolaan yang tertib dan terbuka. NM selaku Kepala Desa menegaskan bahwa setiap kegiatan dan transaksi BUMDes wajib dipertanggungjawabkan melalui laporan resmi yang kemudian disampaikan dalam musyawarah desa. AA sebagai Direktur BUMDes menjelaskan bahwa seluruh transaksi keuangan dicatat, dilaporkan ke pemerintah desa, dan diverifikasi oleh pendamping desa serta pihak kecamatan; arsip laporan, rekap transaksi, dan dokumen monitoring tersimpan rapi di sekretariat. Selain itu, GOR tercatat sebagai aset desa yang pengelolaannya dipercayakan kepada BUMDes, sementara sebagian laba usaha dialokasikan untuk santunan kelahiran, sakit, dan kematian. Hal ini selaras dengan pengalaman mitra, di mana I menyampaikan bahwa perkembangan usaha dan kondisi BUMDes selalu diinformasikan dalam forum desa, sehingga mitra merasa dilibatkan dan dapat mengikuti secara langsung bagaimana BUMDes dikelola.

Praktik tersebut memperlihatkan bahwa akuntabilitas di BUMDes Wargakerta tidak hanya berhenti pada pencatatan administratif, tetapi juga tampak dalam pengawasan berlapis, forum musyawarah yang rutin, dan manfaat sosial yang nyata bagi warga. Kondisi ini selaras dengan Ariski, N.A & Asy'ari (2022) yang menegaskan bahwa akuntabilitas publik menuntut lembaga menjelaskan setiap aktivitas kepada pihak yang berhak meminta pertanggungjawaban. Sementara itu, Mardiasmo (2009) dalam Endang (2021) menekankan kewajiban pemegang amanah untuk melaporkan dan mengungkapkan seluruh aktivitas kepada publik. Oleh karena itu, pengelolaan BUMDes Wargakerta berlangsung transparan, dapat dipantau, dan mendukung keberlanjutan usaha.

d) Peningkatan Kegiatan Pengurus, Komisaris, dan Masyarakat

Peningkatan kegiatan pengurus dan partisipasi mitra di BUMDes Wargakerta tampak dari adanya dukungan pemerintah desa yang memberi ruang bagi pengurus untuk mengembangkan kemampuan melalui pelatihan dan pembinaan dari LPM, universitas, maupun lembaga eksternal lainnya. Melalui kegiatan tersebut, pengurus dapat memperbarui pengetahuan dan keterampilan yang mereka perlukan untuk mengelola administrasi dan operasional unit usaha secara lebih terarah. Di saat yang sama, masyarakat dilibatkan melalui sistem kemitraan yang memungkinkan mereka menjalankan usaha tanpa terbebani modal awal, karena sebagian fasilitas dan kebutuhan usaha telah difasilitasi oleh BUMDes. Pola ini membuat mitra lebih fokus menjalankan kegiatan harian, memperoleh pendapatan tambahan, sekaligus belajar mengelola usaha secara bertahap.

Kondisi tersebut selaras dengan pandangan Dimiyati dan Hanum (2022) yang menyebutkan bahwa BUMDes berperan dalam pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kapasitas pengurus dan pelibatan warga dalam usaha desa. Praktik aktif peningkatan kapasitas dan kemitraan yang berjalan di BUMDes Wargakerta mencerminkan bahwa lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai penggerak ekonomi lokal, tetapi juga sebagai ruang belajar yang membantu masyarakat tumbuh mandiri dan produktif dalam aktivitas ekonominya. Penguatan kapasitas pengurus dan pelibatan mitra menunjukkan bahwa BUMDes Wargakerta berfungsi sebagai wadah pemberdayaan, tempat masyarakat memperoleh dukungan, kesempatan, dan pengalaman untuk membangun kemandirian usaha.

e) Ketaatan BUMDes Wargakerta Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Ketaatan BUMDes Wargakerta terhadap peraturan terlihat dari bagaimana setiap kegiatan usaha dirumuskan, dijalankan, dan dipertanggungjawabkan melalui proses yang terbuka. Keputusan-keputusan penting dibahas dalam musyawarah desa, sementara pengelolaan usaha mengacu pada AD/ART, Perdes, serta SK Kepala Desa sebagai pedoman hukum yang menjadi pijakan kerja. Di lapangan, pengurus menata laporan keuangan dan dokumen kerja sama secara sistematis, menyimpannya di sekretariat, dan menyerahkannya untuk verifikasi berkala kepada pemerintah desa serta pendamping desa. Pola kerja ini tidak hanya memenuhi ketentuan regulasi sebagaimana semangat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tetapi juga mencerminkan pengalaman pengurus yang selalu memastikan bahwa setiap aktivitas BUMDes dapat dilihat, dipantau, dan dipahami oleh masyarakat (Junaidi *et al*, 2021). Keterbukaan dalam musyawarah, penyampaian informasi usaha, hingga praktik pelaporan yang rapi membuat pengurus, pemerintah desa, dan masyarakat berada dalam hubungan saling percaya. BUMDes Wargakerta bukan hanya menjalankan fungsinya sebagai lembaga ekonomi desa, tetapi juga menjadi ruang yang memperkuat tata kelola desa yang transparan dan akuntabel. Kepatuhan BUMDes Wargakerta terhadap aturan tercermin dari musyawarah terbuka, pelaporan yang rapi, dan pedoman hukum yang jelas, sehingga memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat dalam setiap kegiatan usaha.

Peningkatan Pendapatan Keluarga Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui BUMDes Wargakerta

a) Pendapatan keluarga sebelum bermitra dengan BUMDes Wargakerta

Temuan wawancara menunjukkan bahwa sebelum bermitra dengan BUMDes Wargakerta, para mitra berada pada kondisi ekonomi yang serba terbatas dan bergantung pada pekerjaan informal tanpa penghasilan tetap. AA selaku Direktur BUMDes menjelaskan bahwa sebagian besar warga yang kini bermitra sebelumnya bekerja sebagai buruh harian, pedagang kecil, atau penyedia jasa dengan pendapatan yang sangat fluktuatif. Hal ini tercermin dari pengalaman DA selaku pengelola ayam petelur yang sebelumnya bekerja sebagai mekanik dan tukang *steam* dengan pendapatan rata-rata hanya sekitar

Rp1.050.000 per bulan. I, mitra unit Wi-Fi, juga menuturkan bahwa penghasilannya sebagai buruh bordir borongan sering kali tidak mencapai Rp1.000.000 per bulan dan hanya cukup untuk kebutuhan pokok. Situasi serupa dialami II, mitra Lumbung Padi yang hanya memperoleh keuntungan Rp100.000 sampai Rp150.000 per bulan akibat keterbatasan modal, serta AM, mitra PPOB yang pendapatannya terhambat karena sulit mengisi saldo. Bahkan A, pengelola GOR, sebelumnya tidak memiliki pekerjaan tetap dan hanya mendapatkan penghasilan tidak pasti di bawah Rp400.000 per bulan. Temuan-temuan ini menunjukkan adanya pola ketidakpastian ekonomi rumah tangga sebelum kemitraan dibangun.

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa para mitra tidak memiliki kapasitas untuk menabung atau menambah modal, sehingga kesulitan melakukan mobilitas ekonomi. Hal ini selaras dengan *Relative Income Hypothesis* yang dikemukakan oleh James Duesenberry dalam Ramadhan *et al* (2023) yang menyatakan bahwa rumah tangga berpendapatan rendah cenderung menghabiskan penghasilannya untuk kebutuhan dasar, sehingga tidak memiliki kemampuan untuk berinvestasi. Pandangan ini diperkuat oleh Franco Modigliani dalam Mubarak (2025) yang menjelaskan bahwa pada fase pendapatan rendah dan pekerjaan tidak tetap, kemampuan menabung hampir tidak ada. Rendahnya tingkat pendapatan dan ketidakstabilan ekonomi para mitra sebelum bergabung dengan BUMDes semakin menegaskan pentingnya peran kelembagaan desa dalam membuka akses usaha baru. Melalui kemitraan, dukungan modal, dan pendampingan, BUMDes Wargakerta berfungsi sebagai mekanisme pemberdayaan yang memungkinkan keluarga memperoleh pendapatan tambahan yang lebih stabil dan berkelanjutan.

b) Pendapatan Keluarga Setelah Bermitra dengan BUMDes Wargakerta

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan keluarga mitra BUMDes mengalami peningkatan setelah bergabung dengan BUMDes Wargakerta. Hasil wawancara dengan AA selaku Direktur BUMDes Wargakerta mengungkapkan bahwa peningkatan pendapatan terjadi karena mitra memperoleh fasilitas usaha, pendampingan, serta pola kerja yang lebih teratur. Hal ini diperkuat oleh pengalaman para mitra yakni, I selaku mitra unit usaha Wi-Fi yang mengalami kenaikan pendapatan dari kurang dari Rp1.000.000 menjadi sekitar Rp1.500.000 per bulan, sementara DA selaku pengelola pada unit ayam petelur dan ikan lele mengalami peningkatan dari Rp1.050.000 menjadi rata-rata Rp2.800.000 per bulan. Sedangkan II, selaku mitra usaha Lumbung Padi mengalami penambahan pendapatan dari Rp100.000 sampai Rp150.000 menjadi sekitar Rp240.000 per bulan. Adapun AM, selaku mitra pada unit PPOB mengalami peningkatan pendapatan dari Rp150.000 sampai Rp200.000 menjadi Rp300.000 sampai Rp350.000 per bulan, dan A selaku pengelola GOR kini memperoleh pendapatan tetap Rp750.000 per bulan setelah sebelumnya tidak memiliki penghasilan yang pasti. Perbandingan pendapatan keluarga sebelum dan sesudah bermitra dengan BUMDes Wargakerta dapat dilihat pada Tabel 1.

Seluruh unit usaha di atas memberikan tambahan pendapatan, dengan rata-rata peningkatan sekitar Rp 515.000 per bulan. Unit usaha ayam petelur dan Wi-Fi memberi kontribusi kenaikan terbesar, sedangkan unit lain tetap menyumbang tambahan penghasilan yang stabil sesuai sifat usahanya. Temuan peningkatan pendapatan ini selaras dengan konsep kesejahteraan keluarga menurut Soetjipto (1992) dalam Murdianto & Al Faaruuq (2024) yang menyatakan bahwa keluarga dikatakan sejahtera apabila kebutuhan fisik dan sosial anggotanya dapat terpenuhi secara lebih layak. Sebelum bermitra, pendapatan keluarga mitra cenderung habis untuk kebutuhan dasar sehingga ruang untuk menabung dan mengembangkan usaha sangat terbatas. Setelah bergabung dengan BUMDes, mereka memperoleh tambahan penghasilan yang lebih teratur, sehingga pola pendapatannya bergerak dari pendapatan yang bersifat sementara menuju pendapatan yang lebih mendekati pendapatan permanen. Milton Friedman dalam Romdon & Saidah (2021) menjelaskan bahwa pendapatan keluarga yang diterima secara rutin dan dapat diperkirakan mendekati pendapatan permanen membantu keluarga merencanakan keuangan dan

meningkatkan taraf hidup. Adanya kemitraan ini mendorong para mitra menjadi lebih mandiri, produktif, dan memiliki kondisi ekonomi keluarga yang lebih stabil daripada sebelumnya. Secara keseluruhan, data perbandingan pendapatan dan kajian teori menunjukkan bahwa kemitraan dengan BUMDes Wargakerta tidak hanya menaikkan pendapatan keluarga, tetapi juga memperkuat rasa aman ekonomi, mendekatkan keluarga pada kondisi sejahtera, dan membuka ruang perencanaan keuangan jangka panjang.

Tabel 1. Perbandingan Pendapatan Keluarga Mitra BUMDes Wargakerta Sebelum dan Sesudah Bermitra

No.	Mitra/Unit Usaha	Pendapatan sebelum bermitra (Rp/Bulan)	Pendapatan setelah bermitra (Rp/Bulan)	Peningkatan pendapatan (Rp/Bulan)
1.	DA, Ayam Petelur & Ikan Lele	1.050.000	2.800.000	1.750.000
2.	II, Lumbung Padi	100.000-150.000	240.000	90.000
3.	AM, PPOB	150.000-200.000	300.000-350.000	150.000
4.	I, Wi-Fi	< 1.000.000	1.500.000	500.000
5.	A, GOR Desa	< 400.000	750.000	350.000
Total Peningkatan				Rp 3.090.000
Rata-rata Peningkatan / Unit Usaha				Rp 515.000

Sumber: Hasil Survey Lapangan

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes Wargakerta berlangsung melalui tujuh tahapan yang saling terintegrasi, yaitu persiapan, pengkajian, perencanaan, formalisasi, implementasi, evaluasi, dan terminasi. Seluruh tahapan tersebut dijalankan secara terstruktur, partisipatif, dan terdokumentasi dengan baik sehingga mendorong meningkatnya kemandirian mitra dalam mengelola usaha. Melalui enam unit usaha yang dijalankan, BUMDes Wargakerta mampu meningkatkan pendapatan keluarga mitra dengan rata-rata tambahan sekitar Rp515.000 per bulan. Kontribusi terbesar berasal dari unit ayam petelur dan layanan Wi-Fi, sedangkan unit PPOB, lumbung padi, pengelolaan GOR, dan budidaya ikan lele juga tetap memberikan tambahan penghasilan. Selain berdampak pada aspek ekonomi, sebagian keuntungan usaha juga dialokasikan untuk kegiatan sosial, seperti santunan kelahiran, sakit, dan kematian. Dengan demikian, BUMDes Wargakerta terbukti berperan dalam meningkatkan pendapatan keluarga sekaligus memperkuat kesejahteraan sosial masyarakat desa.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa Wargakerta perlu terus memperkuat dukungan kebijakan terhadap BUMDes melalui fasilitasi, pendampingan, dan evaluasi rutin agar setiap unit usaha tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dikelola secara akuntabel. Pengurus BUMDes diharapkan mempertahankan pola kemitraan yang telah berjalan baik, sekaligus meningkatkan kualitas pendampingan serta pengelolaan administrasi dan keuangan agar usaha semakin stabil dan berkelanjutan. Adapun mitra usaha diharapkan tetap disiplin dalam penyeteroran hasil, pelaporan, dan komunikasi dengan pengurus, serta mampu mengelola pendapatan tambahan secara lebih terencana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Desa Wargakerta, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya, yang telah memberikan izin, dukungan, dan kepercayaan selama proses penelitian berlangsung. Penghargaan yang tulus juga penulis sampaikan kepada pengurus BUMDes Kerta Setra Utama serta para mitra unit

usaha mulai dari budidaya ayam petelur, budidaya ikan lele, lumbung padi, Wi-Fi Wargakerta, BRILink dan PPOB, hingga pengelolaan GOR Desa yang telah meluangkan waktu, berbagi pengalaman, dan membuka akses data sehingga proses penggalian informasi terkait tahapan pemberdayaan dan peningkatan pendapatan keluarga dapat berjalan dengan baik.

Penulis juga berterima kasih kepada para tokoh masyarakat dan warga Desa Wargakerta yang telah menerima kehadiran penulis dengan hangat, serta berpartisipasi aktif dalam wawancara, diskusi, dan klarifikasi data di lapangan. Atas keterbukaan dan kepercayaan yang diberikan, penelitian mengenai praktik pemberdayaan masyarakat melalui program BUMDes ini dapat tersusun sebagai gambaran nyata bagaimana desa mengelola potensi lokal untuk menguatkan ekonomi keluarga.

Tidak lupa, penulis menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada dosen pembimbing dan seluruh pihak di lingkungan program studi serta lembaga yang telah memberikan arahan, masukan, dan dukungan dalam penyusunan dan penyelesaian artikel ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis berharap, tulisan ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan rujukan bagi pengembangan kebijakan dan praktik pemberdayaan masyarakat berbasis BUMDes, serta menjadi kontribusi kecil dalam upaya memperkuat kemandirian ekonomi dan kesejahteraan keluarga di tingkat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariski, N.A & Asy'ari, M.A. 2022. "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 'Jaya Tirta'. *Jurnal Riset Akuntansi* 12 (2): 230–49. <https://doi.org/10.36733/juara.v12i2.5159>.
- Dian, Tiara Rama, and Muhammad Farid Ma'ruf. 2019. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Padat Karya Tunai (Studi Kasus Desa Plandaan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)." *Jurnal Publika* 7 (4). <https://doi.org/10.26740/publika.v7n4.p%25p>.
- Dimas Alif Budi N., M. Saleh Soeaidy, Minto Hadi. 2013. "Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Keterampilan Dasar (Studi di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol. 1 (5): 862–871.
- Dimiyati, Ahmad, and Nurilah Hanum. 2022. "Peningkatan Kualitas Manajemen Keuangan Bumdes Melalui Bimtek di Desa Ciampea Udik Kecamatan Ciampea." *Dedikasi PKM* 3 (3): 391–96. <https://doi.org/10.32493/dedikasipkm.v3i3.23983>.
- Djazuli, R Achmad. 2024. *Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat*. Edited by Bachtiar Febrianto. Sumatera: UMG Press.
- Endang. 2021. "Aspek Akuntabilitas dalam Pertanggungjawaban Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Badan Usaha Milik Desa Mukti Bersama Desa Sidomukti Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin)." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmanyah (Jiar)* 5 (1): 74–93. <https://doi.org/10.51877/jiar.v5i1.215>.
- Fathulloh, Jihad, Yus Darusman, and Wiwin Herwina. 2024. "Konsep Pemberdayaan Masyarakat Melalui Keterampilan Batik Ecoprint Desa Linggajati Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya." *Education Sciences: Fondation & Application (JESFA)* 3 (1): 44–57. <https://doi.org/10.56959/jesfa.v3i1.82>.
- Junaidi, Amri Amir, Adi Bhakti, and Eko Prasetyo. 2021. "Peranan Badan Usaha Milik Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1(1):7–10. <https://doi.org/10.53867/jpm.v1i1.7>.
- Khairina, Dhania Rizky, Ike Wanusmawatie, and Wahyu Kurniawan Permadi. 2025. "Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Desa (Systematic

- Literature Review pada Penerapan Society Centered Approach dalam Pengembangan Bumdes).” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9(2):22645–53.
- Mubarak, Hafizh Maulana. 2025. “Pengaruh Pendapatan dan Gaya Hidup Terhadap Tingkat Konsumsi pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) SMA 1 Padang Panjang Skripsi.” *Doctoral Dissertation, IAIN Kendari*.
- Murdianto, and Umar Al Faaruuq. 2024. “Hubungan Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Pengelolaan Desa Wisata dengan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Kasus: Perempuan Desa Wisata Senaru, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat).” *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]* 8 (01): 41–55. <https://doi.org/10.29244/jskpm.v8i01.1211>.
- Patilaiya, Herudin La. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat*. Edited by S. Tr.Kes Rantika Mida Sahara. *Jurnal Ilmiah CIVIS*. Vol. 2. Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- PrimaFira, Andi, Muhammad Irwan Tahir, and Qurnia Andayani. 2024. *Konsep Pemberdayaan Masyarakat*. Edited by Rahmi Hidayanti, SKM. Padang Sumatera Barat: Hei Publishing Indonesia.
- Ramadhan, Anggia, Radian Rahim, and Nurul Nabila Utami. 2023. “Teori Pendapatan (Studi Kasus: Pendapatan Petani Desa Medan Krio).” *Tahta Media Group*, 1–55.
- Romdon, Anggi Sahru, and Zumi Saidah. 2021. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konsumsi Rumah Tangga di Indonesia. *KaliAgri Jurnal* 2 (2). <https://doi.org/10.56869/kaliagri.v2i2.246>.
- Shifa, Ita Nur Layyinatush, and Ilyas Ilyas. 2021. “Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa.” *Jendela PLS* 5 (2): 76–87. <https://doi.org/10.37058/jpls.v5i2.2705>.

